

**PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN,  
KOMITMEN MANAJEMEN, DAN PENGENDALIAN INTERNAL  
TERHADAP TRANSPARANSI PELAPORAN  
KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)**

**Oleh :**  
**Tryoandha Mashunri**  
**Pembimbing : Amries Rusli Tanjung, Volta Diyanto**

*Faculty of Economics and Business Riau University, Pekanbaru, Indonesia*  
Email : [tryoandha@gmail.com](mailto:tryoandha@gmail.com)

*Effect Of External Pressure, Environmental Investigation, Management  
Commitments, And Internal Controlon Reporting  
Transparency Regional Finances  
(Empirical Studies on SKPD in Indragiri Hulu District)*

**ABSTRACT**

*This study aims to examine directly the influence of external pressure, environmental uncertainty, management commitment, and internal control over the application of transparency of local financial reporting. This research was conducted in Indragiri Hulu Regency. The population in this research is 25 SKPD of Indragiri Hulu Regency. The number of samples of this study was 46 respondents. The research method used in this research is purposive sampling, while the data processing method used in this research is path analysis using SPSS 24.00 software to process the data. The results of this study indicate that external pressure affects the implementation of local financial reporting with a significant value of 0.038 (<0.05). Environmental uncertainty affects the implementation of local financial reporting with significant value of 0.038 (<0.05). Management commitment has an effect on the implementation of local financial reporting with significant value equal to 0,027 (<0,05). And internal control affects the implementation of local financial reporting with significant value of 0.000 (<0,05).*

*Keywords : external pressure, environmental uncertainty, management commitment, internal control, local financial reporting, transparency.*

**PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005

dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang di perbaharui menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan yang sangat mendasar dalam peraturan ini adalah bergesernya fungsi *ordonancing* dari badan atau bagian keuangan ke setiap SKPD dan SKPD sebagai *accounting entity* berkewajiban untuk membuat laporan keuangan SKPD serta penegasan bahwa bendahara pengeluaran sebagai pejabat fungsional dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, *good governance* menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi keberadaannya dan mutlak harus terpenuhi.

Variabel terpenting dari *good governance* adalah transparansi dalam tingkat kebijakan dan administratif anggaran. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya (Sumarsono,2009).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2014 pada semester I tahun 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu,

Miswanto,S.E dan Bupati Indragiri Hulu, H.Yopi Arianto,S.E di Auditorium Kantor Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau, Jumat, 29 Mei 2015 pukul 16.00 WIB. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 dikemas dalam tiga buku. Buku I adalah LHP yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah dan opini atas Laporan Keuangan tersebut. Buku II memuat atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III adalah LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini **Wajar Dengan Pengecualian** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2014. BPK menemukan adanya **kelemahan sistem pengendalian intern** dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu: (1) Penyertaan modal di 3 (tiga) BUMD tidak berdasarkan Perda dan nilai investasi permanen pada PDAM Tirta Indra tidak dapat diyakini kewajarannya; (2) Penyertaan modal kepada PD Indragiri berupa asset tidak dapat diyakini kewajarannya, pengembalian 13 (tigabelas) asset kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu belum berdasarkan BAST dan biaya operasional PD Indragiri membebani APBD TA 2014; (3) Pengelolaan asset tetap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu TA 2014 belum optimal; dan (4) Pengelolaan asset lain-lain belum optimal. BPK juga menemukan adanya **ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan** dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu: (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, pertimbangan

objektif lainnya, prestasi kerja tidak berdasarkan kriteria yang terukur; (2) Pertanggungjawaban biaya tiket pesawat tidak sesuai dengan harga sebenarnya, biaya perjalanan dinas melebihi tarif, indikasi perjalanan dinas tidak dilaksanakan, serta realisasi perjalanan dinas belum dipertanggungjawabkan; (3) Terdapat kelebihan pembayaran pada 4 (empat) paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Jaminan Pemeliharaan belum dicairkan; dan (4) Terdapat kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan pembangunan SDN 007 Sekip Hulu (tahap I) dan tanggung jawab pemeliharaan yang belum dilaksanakan.

Dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, laporan keuangan tersebut mendapatkan hasil Wajar Dengan Pengecualian. Pengecualian yang diberikan oleh BPK meliputi, Penyertaan modal di 3 (tiga) BUMD tidak berdasarkan Perda dan nilai investasi permanen pada PDAM Tirta Indra tidak dapat diyakini kewajarannya, Penyertaan modal kepada PD Indragiri berupa asset tidak dapat diyakini kewajarannya, pengembalian 13 (tiga belas) asset kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu belum berdasarkan BAST dan biaya operasional PD Indragiri membebani APBD TA 2014, Pengelolaan asset tetap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu TA 2014 belum optimal, Pengelolaan asset lain-lain belum optimal. Sedangkan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015 juga mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Pengecualian yang diberikan adalah nilai investasi

penyertaan modal dan nilai asset lain-lain. Melihat hal tersebut, sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana transparansi dan akuntabilitas yang ada pada SKPD di Kabupaten Indragiri Hulu.

Sedangkan pada LKPD TA 2015, yang menjadi pengecualian adalah Nilai investasi permanen penyertaan modal dan nilai aset lain-lain dikecualikan untuk opini yang diberikan atas LKPD Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Ini menggambarkan walaupun adanya kenaikan opini yang artinya adanya perubahan LKPD menjadi lebih baik, namun masih saja menandakan belum transparannya LKPD pada Kabupaten Indragiri Hulu ([bpk.go.id](http://bpk.go.id))

Tekanan eksternal bersumber dari luar SKPD seperti peraturan (regulasi), eksekutif, masyarakat dan sebagainya. Frumkin dan Galaskiewicz (2004) menyatakan bahwa tekanan eksternal dapat mempengaruhi tingkat kemampuan pemerintah menjadi lebih rendah, terutama yang terkait dengan penerapan suatu kebijakan maupun prosedur. Adanya tekanan eksternal dapat berakibat pada praktik SKPD yang hanya bersifat formalitas untuk memperoleh legitimasi. Praktik-praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Ketidakpastian lingkungan didefinisikan sebagai faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi dan berpotensi mengganggu kinerja organisasi bila organisasi tidak mampu beradaptasi dengan baik terhadap laju perubahan maupun dinamikanya, yang terdiri dari faktor-faktor tingkat perubahan

regulasi, tingkat perubahan teknologi informasi, tingkat perubahan pasar dan persaingan. Ketidakpastian lingkungan merupakan persepsi dari anggota organisasi dalam mengantisipasi pengaruh faktor lingkungan terhadap organisasi.

Transparansi pelaporan keuangan mengharuskan organisasi untuk menyajikan laporan keuangan yang bebas dari salah material dan informasi yang bias kepada pihak luar. Hal tersebut sesuai dengan konsep keterandalan *reliability* dimana informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (PP No.71/2010). Keterandalan dipengaruhi oleh ketidakpastian dari item-item yang diakui dan diukur dalam laporan keuangan (Ridha dan Basuki, 2012). Walaupun demikian, organisasi akan menyajikan struktur formal dari akun-akun yang bisa diterima *acceptable account* atas setiap kegiatan organisasi (Ridha dan Basuki, 2012) guna memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi akan mendorong organisasi untuk mengungkapkan informasi secara penuh tentang proses maupun praktiknya dalam laporan keuangan untuk memenuhi prasyarat kualitas keterandalan *reliability*.

Ketidakpastian lingkungan yang tinggi akan menyebabkan *manager* sulit untuk menyusun perencanaan dan pengendalian organisasi yang akurat. Perencanaan yang disusun dalam situasi ketidakpastian lingkungan yang tinggi akan menjadi problemalitas, karena adanya ketidakmampuan manajer untuk memprediksi kondisi

di masa mendatang (Ridha dan Basuki, 2012).

Di dalam pemerintahan diperlukan sumber daya manusia yang memiliki peranan penting sebagai penggerak demi kelancaran jalannya kegiatan usaha, kinerja organisasi publik harus dilihat secara luas dengan mengidentifikasi keberhasilan organisasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan melakukan perbaikan-perbaikan maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena kinerja pemerintah telah mengarah ke *good governance*, salah satu cara yaitu dengan menciptakan transparansi laporan keuangan setiap SKPD kepada publik. Komitmen menurut Robbins dan Timothy dalam Nafesa (2014) mendefinisikan komitmen sebagai janji yang harus dilaksanakan, pada penelitian ini komitmen yang di teliti adalah komitmen manajemen dalam menciptakan transparansi dalam mengelola dan menyajikan laporan keuangan daerah. Untuk menerapkan transparansi pengelolaan keuangan dibutuhkan komitmen yang tinggi oleh segenap jajaran pemerintah daerah. Kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat. Sistem Manajemen yang baik yaitu jika SKPD memiliki staf yang handal dan berkompeten dibidangnya akan berdampak pada tercapainya transparansi pelaporan keuangan sehingga standar profesionalisme pada SKPD dapat terpenuhi.

Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sistem pengendalian internal merupakan sistem yang dibuat oleh pemerintah agar setiap element yang ada dalam pemerintahan memiliki suatu aturan yang tersusun dan terorganisir dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK mengenai LKPD Kabupaten Indragiri Hulu yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian, salah satunya terhadap **kelemahan sistem pengendalian intern** dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengendalian internal.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) apakah terdapat pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan? 2) apakah terdapat pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan? 3) apakah terdapat pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan? 4) Apakah terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal terhadap

penerapan transparansi pelaporan keuangan. 2) Untuk mengetahui pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. 3) Untuk mengetahui pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. 4) Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

### Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Transparansi yaitu memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (PP No 71 Tahun 2010). Penerapan Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya (Sukhemi, 2011).

Penerapan transparansi di organisasi sektor publik diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak internal (manajemen) dan pihak eksternal (masyarakat). Silver (2005) mengatakan bahwa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menuntut organisasi untuk lebih transparan.

Adapun indikator yang digunakan untuk penerapan transparansi pelaporan keuangan menurut Krina (2003) adalah: penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan, meningkatkan arus informasi.

### **Tekanan Eksternal**

Tekanan eksternal adalah kondisi lingkungan yang berada di luar kendali organisasi yang berpengaruh signifikan pada rencana strategis dan rencana operasional, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada kualitas output, dalam hal ini laporan keuangan (Wahyuni, 2014). Tekanan eksternal dalam hal ini terkait dengan tekanan yang berasal dari luar SKPD seperti peraturan (regulasi), eksekutif, masyarakat, dan sebagainya. Frumkin dan Galaskiewicz (2004) menyatakan bahwa tekanan eksternal dapat mempengaruhi tingkat kemampuan pemerintahan menjadi lebih rendah, terutama yang terkait dengan penerapan suatu kebijakan maupun prosedur. Adanya tekanan eksternal dapat berakibat pada praktik-praktik SKPD yang hanya bersifat formalitas untuk memperoleh legitimasi.

Adapun indikator untuk tekanan eksternal menurut Ridha (2012) adalah Peraturan, Regulasi, Eksekutif, Masyarakat, Eksekutif lain

### **Ketidakpastian Lingkungan**

Menurut Listeria (2009) menyatakan bahwa ketidakpastian merupakan rasa ketidakmampuan individu dalam memprediksi sesuatu secara tepat. Ketidakpastian

lingkungan sebagai ketidakmampuan individu untuk menilai probabilitas seberapa besar keputusan yang telah dibuat akan gagal atau berhasil yang disebabkan karena kesulitan untuk memprediksi situasi disekitarnya sehingga mencoba untuk melakukan sesuatu untuk Menurut Listeria (2009) ada tiga tipe ketidakpastian lingkungan yaitu:

1. Ketidakpastian keadaan (*state uncertainty*).
2. Ketidakpastian pengaruh (*effect uncertainty*).
3. Ketidakpastian respon (*respons uncertainty*).

Adapun indikator Ketidakpastian Lingkungan menurut Teo, et al (2003) dan Ugrin (2009) dalam Rudi (2012) adalah Persepsi terhadap keberhasilan, Tingkat keberhasilan adopsi dari sistem, Peraturan dari organisasi sejenis, Menyediakan informasi keuangan baik positif maupun negatif

### **Komitmen Manajemen**

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka, yaitu komitmen normative melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan dan komitmen normative melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*). Berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Septiani, 2005).

Komitmen manajemen memiliki arti lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan yang aktif dan keinginan instansi untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya (Elka,2014).

Adapun indikator komitmen manajemen menurut Ridha (2012) adalah Staf yang andal dan kompeten di bidangnya dan Dibangunnya budaya etis secara komprehensif

### **Pengendalian Internal**

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

### **Pengaruh Tekanan Eksternal terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP No 71 tahun 2010 dijelaskan dalam hal penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh entitas pelaporan harus melaporkan hasil capaiannya secara terstruktur dan sistematis.

Hasil penelitian Ridha (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penerapan Transparansi ditujukan agar semua pihak yang berkepentingan bisa mengetahui kemana alokasi dana digunakan dan apakah telah sesuai dengan pencatatan dan peraturan yang berlaku Ridha (2012). Dikarenakan faktor peraturan sangat mendukung dalam hal pelaporan keuangan, maka dapat dikatakan bahwa tekanan eksternal mampu mempengaruhi terciptanya penerapan transparansi pelaporan keuangan Ridha (2012). Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesisnya adalah:

H1: Terdapat pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

### **Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Ketidaksiapan instansi terhadap suatu standar berupa peraturan akan berakibat pada rendahnya pemahaman organisasi atau instansi dalam bertransformasi ke peraturan yang baru. Dalam situasi yang tidak pasti, pemimpin akan memutuskan bahwa respon terbaik adalah dengan meniru organisasi yang mereka anggap berhasil. (Mizruchi dan Fein,1999). Transparansi pelaporan keuangan mengharuskan instansi untuk menyajikan laporan keuangan yang bebas dari salah material dan informasi yang bias kepada publik. Hal ini sesuai dengan konsep keterandalan (*reliability*) (PP No. 71/2010. Hasil penelitian Fardian (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh ketidakpastian lingkungan

terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesisnya adalah:

H2: Terdapat pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

### **Pengaruh Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Komitmen Manajemen adalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut (Wikipedia, 2014). Untuk menerapkan transparansi pelaporan keuangan dibutuhkan komitmen yang tinggi oleh segenap jajaran pemerintah daerah. Hasil penelitian Elka (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesisnya adalah:

H3: Terdapat pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

### **Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Pengendalian yang berupa pengendalian internal dan pengendalian manajemen berada di bawah kendali eksekutif (pemerintah pusat dan daerah) dan dilakukan untuk memastikan strategi dijalankan dengan baik sehingga tujuan dapat dicapai, sedangkan pemeriksaan (audit) dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi dan independensi untuk mengukur apakah kinerja eksekutif sudah sesuai

dengan kriteria yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002). Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan penerapan sistem pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sistem pengendalian intern tersebut harus memuat prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah (PP No.8 tahun 2006).

Penelitian yang dilakukan Primayani (2014) meneliti tentang Pengaruh Pengendalian Internal, Value For Money, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Klungkung, Bali) secara parsial dapat diketahui bahwa Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di SKPD Kabupaten Klungkung.

Nugraha (2011) meneliti tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Aset Tetap Pemerintah (Studi Kasus Pada

Pemerintah Kota Cimahi). Hasil penelitiannya adalah sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas asset tetap pemerintah.

**H<sub>4</sub>** :Terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah 25 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 46 responden yang terdiri dari Kepala SKPD dan Kabag keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, yang merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yaitu menggunakan kuesioner.

### Metode Analisis Data Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2011: 11) statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel yang digunakan dalam penelitian sehingga menghasilkan nilai rata-rata, maksimum, minimum dan standar deviasi.

### Pengujian Kualitas Data

Sebelum dilakukan pengolahan data perlu dilakukan pengujian data yang terdiri dari:

### Uji Validitas Data

Uji validitas dilakukan dengan melihat  $r_{tabel}$ . Nilai  $r_{tabel}$  dicari

pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n). Nilai  $r_{tabel}$  yang diperoleh dibandingkan dengan nilai  $r_{hitung}$  untuk menguji validitas dari data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Dengan kata lain, masing-masing jawaban pertanyaan dengan total jawaban pada setiap variabel penelitiannya saling dikorelasikan. (Ghozali,2011).

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk memenuhi konsistensi hasil pengukuran variabel. Pengukuran yang reliabel akan menunjukkan instrumen yang dapat dipercaya dan dapat dihasilkan data yang dapat diandalkan pula. Untuk mengukur reliabilitas di gunakan koefisien *cronbach alpha* untuk mengestimasi validitas setiap skala (indikator observarian). Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki cronbach alpa lebih dari 0.60. (Ghozali, 2011).

### Pengujian Asumsi Klasik

Terdapat 4 asumsi klasik yang digunakan (Ghozali,2011) yaitu:

### Uji Normalitas

Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan alat *uji statistik normal probability plot* (normal P-P Plot) terhadap masing-masing variabel. *Normal probability plot* dilakukan dengan membandingkan nilai observasi (*observed normal*) dan nilai yang diharapkan dari distribusi normal (*expected normal*). Jika sebaran data berada disekitar garis diagonal maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data terdistribusi dengan normal. (Ghozali, 2011).

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Dengan menggunakan software SPSS ver 17.0 maka untuk mengetahui ada atau tidaknya gangguan multikolinearitas dapat dilihat secara umum ditunjukkan oleh nilai *tolerance* dan dari *Varian Inflation Factor* (VIF) dengan batasan nilai VIF untuk masing-masing variabel independen  $< 5$ . Jika  $VIF > 5$  maka variabel tersebut mengalami gangguan multikolinearitas, sebaliknya jika  $VIF < 5$  maka variabel tersebut bebas dari pengaruh multikolinearitas. (Ghozali, 2011).

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam model regresi dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari nilai residual penelitian. Untuk membuktikan ada atau tidaknya gangguan heteroskedastisitas dapat dilihat melalui pola diagram pencar (*Scatterplot*) tidak membentuk pola tertentu disini yang mana polanya menyebar, maka regresi tidak mengalami gangguan. (Ghozali, 2011).

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  atau sebelumnya (Ghozali, 2011). Metode Durbin Watson *test* hanya digunakan untuk auto-korelasitingkat satu (*frist order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen (Ghozali, 2011).

### Teknik Analisis Data

Uji Hipotesis ini bertujuan untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang dinyatakan sebelumnya. Dalam hal ini kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran mengenai nyata atau tidaknya hubungan antara akuntabilitas, ketidakpastian lingkungan, tekanan eksternal, komitmen manajemen dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan (Ghozali, 2011). Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan

Y = Transparansi Pelaporan Keuangan

A = Konstanta

$b_1, b_2, b_3, b_4, b_5$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Tekanan Eksternal

$X_2$  = Ketidakpastian

Lingkungan

$X_3$  = Komitmen

Manajemen

$X_4$  = Pengendalian

internal

e = Standar Error

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh independen terhadap dependen yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Determinasi dihitung dengan rumus: Determinasi =  $R^2 \times 100\%$  (Ghozali, 2009).

### Pengujian Hipotesis

Perlu diketahui apakah semua variabel akuntabilitas, ketidakpastian lingkungan, tekanan eksternal,

komitmen manajemen, dan kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel penerapan transparansi pelaporan keuangan. Untuk mengetahui hal itu perlu dilakukan uji t, pengujian dilakukan dengan dua arah (*two tails*), dengan tingkat keyakinan 95% dan dilakukan uji tingkat signifikansi pengaruh hubungan variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, dimana tingkat signifikansi ditentukan sebesar 5% dan *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n - k$ . Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, dengan kata lain variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Begitu juga sebaliknya, jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menggunakan kuisioner untuk pengumpulan data, objek yang digunakan adalah 25 dinas/kantor/badan di Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan 50 kuisioner yang dikirim dan kuisioner yang kembali berjumlah 46 dan yang dapat diolah berjumlah 46 kuisioner.

### **Hasil Statistik Deskriptif**

Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai deskripsi variabel penelitian yang disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi.

Variabel Tekanan Eksternal menunjukkan nilai mean 22.6739 dengan standar deviasi sebesar 1.77707. Ketidakpastian Lingkungan

menunjukkan nilai mean 15.7826 dengan standar deviasi sebesar 1.86086. Untuk variabel Komitmen Manajemen menunjukkan nilai mean 19.8913 dengan standar deviasi sebesar 2.95318. Pengendalian Internal menunjukkan nilai mean 61.4565 dengan standar deviasi sebesar 7.94343. Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah menunjukkan nilai mean sebesar 20.7174 dengan standar deviasi 3.22258.

### **Hasil Uji Kualitas Data**

#### **Hasil Uji Validitas Data**

Pada penelitian ini seluruh item variabel memiliki  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$  ( $r_{hitung} > 0.290$ ), maka seluruh item pernyataan dinyatakan valid.

#### **Hasil Uji Reliabilitas Data**

Pada penelitian ini data untuk setiap variabel, diperoleh Cronbach Alpha lebih dari 0.70 yang berarti bahwa data tersebut reliabel.

#### **Hasil Uji Asumsi Klasik**

##### **Hasil Uji Normalitas**

Pada penelitian ini, data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya pada grafik P-Plot, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

##### **Hasil Uji Multikolinearitas**

Pada penelitian ini, nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan *VIF*  $< 10$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

##### **Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Pada penelitian ini, grafik scatterplot menunjukkan adanya penyebaran titik secara acak dan tersebar baik diatas maupun dibawah

angka 0 pada sumbu y. Hal ini mengindikasikan pada model regresi yang dikembangkan tidak terdapat masalah heterokedastisitas, yang artinya tidak terjadi ketidaksamaan varians dari satu variabel bebas ke variabel bebas lain.

### **Hasil Analisis Regresi Berganda**

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan persamaan regresi linear berganda:

$$Y = 0.389 + 0.115X_1 + 0.174X_2 + 0.355X_3 + 0.234X_4 + e$$

### **Hasil Pengujian Koefisien ( $R^2$ )**

Pada penelitian ini diperoleh *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0.966. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Komitmen Manajemen, dan Pengendalian Internal dapat menjelaskan variabel Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan sebesar 96%. Sedangkan sisanya 4% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak teramati dalam model penelitian ini.

### **Hasil Pengujian Hipotesis**

#### **Hasil Pengujian Hipotesis Pertama ( $H_1$ )**

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2.145 < t_{tabel} 1.631$ ,  $t_{tabel}$  ( $\alpha = 0,05$  dan  $df = 44$ ) dan signifikansi sebesar 0.038 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Yang berarti dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima yang berarti variabel tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

#### **Hasil Pengujian Hipotesis Kedua ( $H_2$ )**

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2.172 >$

$t_{tabel} 1.631$ ,  $t_{tabel}$  ( $\alpha = 0,05$  dan  $df = 44$ ) dan signifikansi sebesar 0.036 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Yang berarti dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima yang berarti variabel ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

#### **Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga ( $H_3$ )**

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2.300 > t_{tabel} 1.631$ ,  $t_{tabel}$  ( $\alpha = 0,05$  dan  $df = 44$ ) dan signifikansi sebesar 0.027 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Yang berarti dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima yang berarti variabel Komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

#### **Hasil Pengujian Hipotesis Keempat ( $H_4$ )**

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2.315 > t_{tabel} 1.631$ ,  $t_{tabel}$  ( $\alpha = 0,05$  dan  $df = 44$ ) dan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Yang berarti dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima yang berarti variabel pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

### **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

#### **Simpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

2. Ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.
  3. Komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.
  4. Pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.
3. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel lain yang diduga juga dapat mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. misalnya seperti menambahkan variabel gaya kepemimpinan, motivasi, dan akuntabilitas yang mungkin bisa mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

### **Keterbatasan**

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan, diantaranya:

1. Penggunaan metode ini dengan menggunakan metode survey dengan kuesioner, sehingga memungkinkan terjadinya ketidakjujuran dalam menjawab pertanyaan.
2. Responden yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pegawai Eselon III dan Eselon IV yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran yang ada di kabupaten Indragiri hulu.
3. Penelitian ini menggunakan variabel tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah

### **Saran**

1. Penggunaan selain metode survey (kuesioner) seperti metode interview dapat digunakan untuk mendapatkan komunikasi dua arah dengan subjek dan mendapatkan kejujuran jawaban subjek.
2. Memperluas cakupan sampel dan populasi yang digunakan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fardian, D. 2014. *Pengaruh Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris atas SKPD Pemerintah Kota Padang)*. ejournal.unp.ac.id.
- Frumkin, P. Dan Galaskiewichz, J. 2004. *Institutional Isomorphism and Public Sector Organizations*. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Journal of Public Administration Research and Theory.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 3, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

- \_\_\_\_\_, 2015. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Krina P.2003, Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas transparansi partisipasi. Jakarta: sekretariat Good Public Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Listeria, Lena. 2009. *Pengaruh karakteristik informasi system akuntansi manajemen yang bersifat Broad Scope, Desentralisasi dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Manajerial*. Skripsi
- Mardiasmo, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nafesa, Elka,2014. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (SKPD pada Kota Dumai)*.
- Nugraha, Darya Setia, 2011.*Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Aset Tetap Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Cimahi)*. Hasil penelitiannya adalah sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas asset tetap pemerintah. digilib.polban.ac.id
- Primayani, dkk. 2014. *Pengaruh pengendalian internal, value for money, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan(studi empiris pada skpd di pemerintahan daerah kabupaten klungkung)*. Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ridha, M. A dan Basuki, H. dan 2012. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin.
- Robbins Steven dan Timothy. 2008. *Organizational Behavior*. McGrawhill, Irwin.
- Septiani,aditya. 2005 *Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal Yang Sedang Berkembang : Perspektif Teori Pengungkapan*. Tesis dipublikasikan pada Universitas Diponegoro Semarang.
- Silver, D. 2005. *Creating Transparency for Public*

*Companies The Convergence of PR and IR in the Post-Sarbanes-Oxley Marketplace.*  
Public Relations

Sukhemi, 2011. *Pengaruh Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan terhadap Transparansi Keuangan Daerah (di Provinsi D.I. Yogyakarta)*, Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Volume 8, 2011 : 84-95.

Sumarsono, Hadi, 2009. Analisis Kemandirian Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol.1. No 1. 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

\_\_\_\_\_, UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

[www.inhu.go.id](http://www.inhu.go.id)

[www.wikipedia.co.id](http://www.wikipedia.co.id)